

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

# WARTA



ISSN 2085-1975

9 772088 197569

#edisi 2. 2019

**MENINGKATKAN  
KEMANDIRIAN  
DESA**

# WARTA WANTIMPRES

Warta WANTIMPRES adalah media publikasi periodik yang bertujuan untuk menyampaikan profil dan kegiatan Wantimpres kepada publik secara berkala.

**Penanggung Jawab**  
Agus Widodo

**Pimpinan Redaksi**  
M. Arfan Sahib Sali K.

**Editor**  
Untung Widodo  
Veri Nurhansyah T.

**Penyusun**  
Andhi Ilham P.  
Aris Munandar  
B. Bonnik Manoe  
D. Herdiyan  
Dian Kartika Putri  
Fikroh Amali F. A.  
Syahlarriyadi

[www.wantimpres.go.id](http://www.wantimpres.go.id)

## FOKUS



**Jan Darmadi**  
Anggota  
Dewan Pertimbangan Presiden

"Desa sebagai Sumber Pangan Nasional"

## PERSPEKTIF



**Yahya Cholil Staquf**  
Anggota  
Dewan Pertimbangan Presiden

"Pesantren & Kemandirian Desa"



**Agum Gumelar**  
Anggota  
Dewan Pertimbangan Presiden

"Membangun Desa Wisata"

## DAFTAR ISI

01 FOKUS

02 PERSPEKTIF

10 GALERI KEGIATAN

**Alamat Redaksi :**  
Jalan Veteran III No 2 Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3444801  
Faks: (021) 3865092  
email. veri.nurhansyah@setneg.go.id



**Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.**  
Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian majalah ini dengan seizin tertulis dari penulis dan/atau penerbit.

Copyright © 2019

**Foto Cover :**



Sawah di Ubud, Bali  
© Andika Oky Arisandi

Sukapura, Probolinggo (back cover)  
© Silas Baisch - Unsplash



# FOKUS

## Desa sebagai Sumber Pangan Nasional

**Bapak Jan Darmadi**  
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

**"Desa bisa dikatakan sebagai dasar (pembangunan) negara Indonesia".**

Desa merupakan salah satu elemen wilayah yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Berbagai macam sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak mayoritas terkonsentrasi di wilayah perdesaan.

Bapak Jan Darmadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, peran paling fundamental desa adalah sebagai sumber pangan nasional. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, lahan-lahan produksi tanaman pangan terkonsentrasi di wilayah perdesaan.

Produk-produk pangan dari desa inilah yang menyangga kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara nasional. "Desa bisa dikatakan sebagai dasar (pembangunan) negara Indonesia," ungkap Bapak Jan Darmadi.

Peran desa sebagai sumber pangan nasional perlu dipertahankan dan bahkan harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Selain infrastruktur fisik seperti jalan usaha tani, pemerintah dinilai Bapak Jan Darmadi perlu memfasilitasi infrastruktur teknologi informasi di wilayah perdesaan.

Penggunaan teknologi informasi perlu dikembangkan misalnya untuk membantu petani-petani di desa agar dapat melakukan usaha produksi pertanian secara efektif dan efisien di lahan yang kian berkurang. Hal ini lumayan mendesak dilakukan mengingat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri semakin masif.

Teknologi informasi juga diharapkan akan membantu para petani di desa memperoleh akses untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Ini akan memangkas rantai distribusi produk-produk pangan masyarakat desa, sehingga para petani diharapkan akan dapat meraih keuntungan yang lebih tinggi.

Perluasan jangkauan teknologi informasi tersebut tentunya perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Caranya, porsi anggaran pendidikan harus ditingkatkan menjadi minimal 30% dari APBN. Anggaran itu mesti digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan secara masif yang memang lebih dibutuhkan masyarakat desa. "Setiap orang harus punya keahlian dan zaman sekarang menuntut spesialisasi," kata Bapak Jan Darmadi (DKP, ABR, VNT).

Foto : Bonnik



**Bapak Yahya Cholil Staquf**  
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

## PESANTREN & KEMANDIRIAN DESA

*“Kyai terlibat hampir semua masalah yang dihadapi komunitasnya, mulai dari masalah sosial, ekonomi, dan masalah lainnya”.*

Pesantren telah menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam hubungan sosial-kemasyarakatan Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan. Peran utama pesantren memang sebagai lembaga pendidikan yang mencetak pemimpin atau pendidik di lingkup agama Islam.

Namun, menurut Bapak Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, pesantren secara tidak langsung juga mengambil peran sebagai wadah pengkaderan pemimpin-pemimpin komunitas secara umum dalam lingkup sosial-kemasyarakatan.

Hal ini dimungkinkan seiring kultur masyarakat Indonesia, khususnya di perdesaan, yang kerap mempercayakan persoalan multidimensional kepada para pemuka agama atau “kyai”. “Kyai terlibat hampir semua masalah yang dihadapi komunitasnya, mulai dari masalah sosial, ekonomi, dan masalah lainnya”, ujar Bapak Yahya.

Pada perjalanannya, ada upaya, baik dari pemerintah maupun inisiatif dari tokoh-tokoh pesantren, untuk memperluas peran lembaga pendidikan agama tersebut pada kehidupan sosial-kemasyarakatan. Bapak Yahya mencontohkan inisiatif yang

dilakukan oleh Pesantren Maslakul Huda di daerah Kajen, Pati, Jawa Tengah, yang membuat Pusat Pengembangan Masyarakat (PPM).

Melalui inisiatif itu, Pesantren Maslakul Huda mengkonsolidasikan petani untuk membudidayakan komoditas-komoditas pertanian lokal yang menjadi andalan di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Pesantren Maslakul Huda juga memfasilitasi dan membantu para petani untuk mengolah komoditas yang ditanamnya agar memiliki nilai tambah. Dengan program ini, Pesantren Maslakul Huda berhasil membantu para petani di lingkungannya untuk meningkatkan penghasilan.

Bapak Yahya menilai inisiatif-inisiatif seperti ini perlu lebih distimulus agar diadopsi secara luas oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Di satu sisi, pesantren telah memiliki modal kuat dalam hal jaringan yang kuat terutama dengan para alumninya. Di sisi lain, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan memberikan pendampingan kepada pesantren untuk memperluas peranannya, terutama dalam berkontribusi pada komunitas di sekitarnya.

Perpaduan hal-hal inilah yang jika dikelola dengan baik bakal menjadikan pesantren sebagai salah satu poros dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan (AD, BBM, ABR, VNT).

*foto : Demokracija*

## MEMBANGUN DESA WISATA

*“Turis adalah sumber devisa, sehingga masyarakat harus memberikan yang mereka butuhkan, yaitu kenyamanan, keramahan, dan keamanan”.*

Ikhtiar meningkatkan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan upaya bersama para pemangku kepentingan untuk menggerakkan masyarakat desa agar mampu menggali potensi wilayahnya. Pada banyak wilayah, pariwisata merupakan salah satu potensi yang kerap kali mampu menjadi dongkrak suatu desa untuk meraih kemandirian.

Namun, perlu diakui bahwa banyak desa di Indonesia belum memaksimalkan potensi pariwisata yang dimilikinya akibat banyak faktor, terutama dalam hal strategi pengembangan objek pariwisata maupun itikad untuk memberikan kesan yang baik kepada wisatawan.

Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres mengatakan, masyarakat perdesaan memang banyak yang belum mengetahui bahwa pengembangan pariwisata mesti holistik dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan objek pariwisata hingga kesadaran masyarakat sebagai insan pariwisata.

Masyarakat perlu diedukasi bahwa pariwisata bukan hanya soal menjual panorama alam yang indah saja, tapi juga menawarkan aspek lain terutama dalam hal memperlakukan wisatawan. “Masyarakat harus sadar bahwa turis adalah sumber

devisa, sehingga masyarakat harus memberikan yang mereka butuhkan, yaitu kenyamanan, keramahan, dan keamanan,” ujar tokoh masyarakat Sunda lintas generasi tersebut.

Bapak Agum sendiri terlibat langsung dalam mengedukasi pengembangan pariwisata kepada masyarakat perdesaan. Beliau misalnya telah membantu salah satu desa di lereng Gunung Ciremai, Desa Cibuntu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk menjadi desa wisata. Masyarakat di sana dibina dan didampingi agar dapat memperlakukan wisatawan dengan baik.

Tak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk membenahi rumah-rumah mereka dan menjaga kebersihan desa. “Kini apa yang terjadi? Muncul banyak *homestay* yang penuh bukan hanya oleh turis lokal, tapi juga turis asing,” ungkap Bapak Agum. Selain Desa Cibuntu, Bapak Agum juga tengah membina satu desa lain di Kabupaten Kuningan, yakni Desa Lingga Mekar untuk menjadi desa wisata berbasis sejarah.

Untuk membangun desa wisata, diperlukan pula kelembagaan desa yang kuat dan dipercaya masyarakat. Bapak Agum menekankan seluruh unsur kelembagaan desa, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, harus mengedepankan musyawarah mufakat agar satu langkah dalam upaya mengembangkan desa (FA, ARD, VNT).

*foto : Pusat Penerangan TNI*



**Bapak Agum Gumelar**  
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden



**Bapak Eko Putro Sandjojo**  
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

## DANA DESA MENSTIMULUS KEMANDIRIAN

*“Dana Desa merupakan bukti bahwa keinginan Bapak Presiden untuk membangun desa bukan hanya retorika politik semata”.*

Sejak terpilih pada 2014 silam, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penting pada program pembangunan desa. Hal ini diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang memang mayoritas berada di desa. Program pembangunan desa tersebut salah satunya disokong dengan penyaluran Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di 2018, penyaluran Dana Desa sudah mencapai Rp 60 triliun untuk 74.957 desa. Itu artinya setiap desa menerima Dana Desa kurang lebih Rp 800,4 juta.

“Ini merupakan bukti bahwa keinginan Bapak Presiden untuk membangun desa bukan hanya retorika politik semata,” ungkap Bapak Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi kepada *Warta Wantimpres*.

Dana Desa ternyata terbukti dapat menstimulus kemandirian banyak desa di berbagai wilayah. Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, contohnya. Sebelum menerima Dana Desa, Ponggok merupakan desa miskin dengan penduduk yang padat. Lahan pertanian di desa ini juga sangat minim karena tergerus oleh permukiman warga.

Satu-satunya kekayaan Ponggok adalah banyaknya mata air. Pada zaman penjajahan, kekayaan mata air ini dimanfaatkan Belanda untuk membangun banyak kolam renang. Sebelum dipermak menggunakan Dana Desa, kolam renang-kolam renang tersebut tidak terawat dan kotor sehingga hanya mampu menarik pendapatan kurang dari Rp 15 juta per tahun.

Masyarakat Ponggok, didampingi oleh BNI, kemudian memanfaatkan Dana Desa untuk mengubah konsep kolam renang menjadi kolam tematik yang menarik wisatawan untuk swafoto. Konsep ini berhasil mendongkrak pendapatan Desa Ponggok menjadi rata-rata Rp 6,3 miliar dengan laba bersih rata-rata Rp 3 miliar per tahun.

Contoh lain Desa Kutuh di Badung, Bali. Kutuh memanfaatkan Dana Desa untuk memotong tebing yang curam agar para warganya lebih mudah membudidayakan rumput laut di pantai. Setelah dipotong, lanskap wilayah Kutuh ternyata menjadi indah dan menarik banyak wisatawan.

Di 2018, Kutuh dikunjungi empat juta wisatawan dengan pendapatan Rp 52 miliar dan laba bersih Rp 17 miliar. Kutuh juga memiliki lembaga simpan pinjam dengan aset Rp 127 miliar. “Ponggok dan Kutuh berhasil mandiri karena Dana Desa. Jumlah pajak yang dibayarkan ke negara saja melebihi Dana Desa yang diterimanya,” kata Bapak Eko (BBM, VNT).

*foto : Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi*

# MENGGAPITALISASI PRODUK SENI BUDAYA DESA

*“Sebelum memasarkan kepada khalayak luas, Masyarakat harus bangga dengan produk-produk seni budaya yang dimilikinya”.*

Seni budaya merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki hampir seluruh wilayah Nusantara. Setiap daerah, termasuk dari lingkup terkecil, yakni wilayah perdesaan, memiliki beragam produk-produk seni budaya yang unik dan menarik.

Produk-produk seni budaya tersebut bermacam-macam jenisnya, mulai dari seni kriya, musik tradisional, hingga seni pertunjukkan maupun upacara adat tradisional. Berbagai macam produk seni budaya ini tentunya dapat menjadi salah satu katalisator guna meningkatkan kemandirian komunitas masyarakat khususnya di lingkup perdesaan.

Pada kenyataannya, banyak daerah yang belum bergerak untuk memaksimalkan potensi meraup devisa dari produk-produk seni budaya yang dimilikinya. “Bahkan, masyarakat khususnya di desa-desa banyak yang tidak menyadari bahwa produk-produk seni budaya yang dimiliki wilayah atau komunitasnya itu bernilai jual tinggi,” ungkap Ibu Julie Trisnadewani, Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto.

Oleh karena itu, Ibu Julie menjelaskan, untuk mengkapitalisasi produk-produk seni budaya tersebut perlu sinergi dari semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat, perangkat desa, pemerintah

daerah dan pusat, hingga komunitas nasional. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat desa untuk menggali produk-produk seni budaya yang dimilikinya. “Mereka harus bangga dulu dengan produk-produk seni budayanya sendiri,” kata Ibu Julie.

Di sisi lain, pemerintah maupun komunitas seni budaya yang lebih luas juga mesti membantu masyarakat desa untuk mengembangkan produk-produk seni budaya agar sesuai dengan selera khalayak luas. Ini tentunya tanpa meninggalkan kekhasan produk-produk seni budaya masyarakat tersebut.

Nantinya, strategi ini diyakini bakal memperluas cakupan kelompok konsumen yang tertarik pada produk-produk seni budaya masyarakat desa. Contohnya saja kain tenun khas Sumba. Selama ini, kain tenun Sumba kebanyakan dibeli oleh kelompok konsumen terbatas. “Jika dibuat model-model kekinian, kain-kain tersebut sangat mungkin menarik generasi milenial,” jelas Ibu Julie.

Pemerintah perlu juga menstimulus pemasaran produk seni budaya dengan menyiapkan infrastruktur, terutama jaringan teknologi informasi. Masyarakat di desa-desa akan lebih mudah menjangkau banyak konsumen jika memasarkan produk-produknya melalui internet. “Yang paling penting, masyarakat harus dibekali pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi secara tepat,” kata Ibu Julie (BBM, VNT).

*foto : Dokumentasi Pribadi*



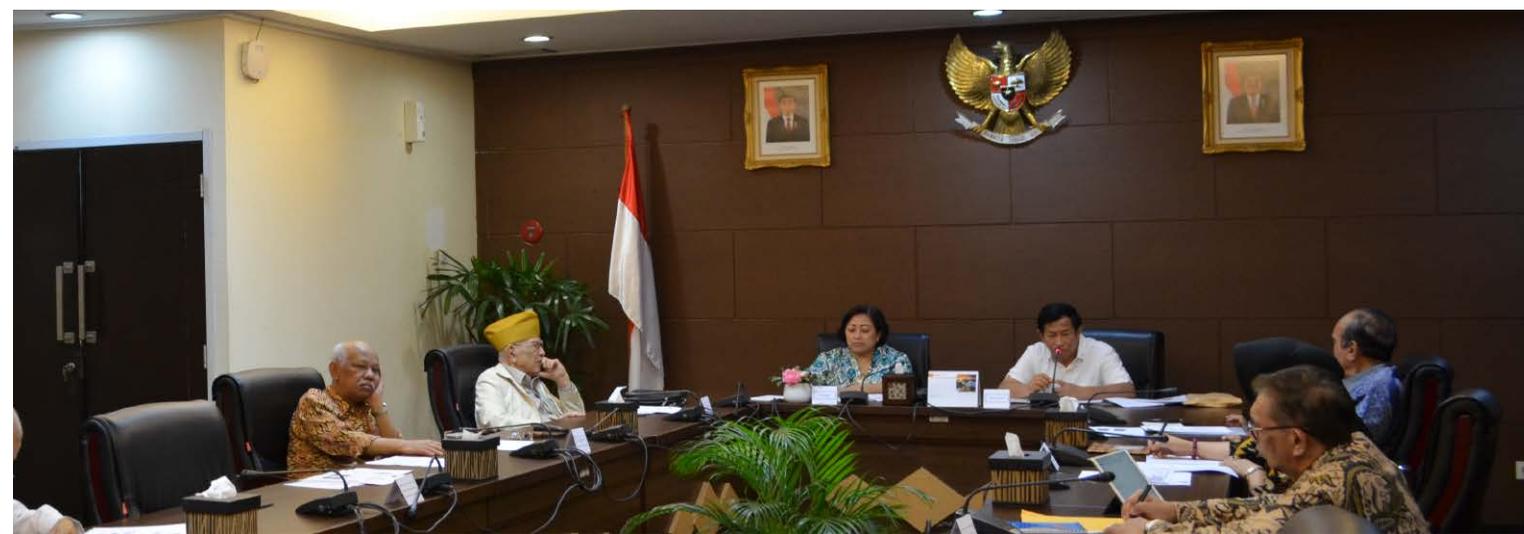
**Julie Trisnadewani**  
Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto

# GALERI KEGIATAN



Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, beserta empat Anggota Wantimpres, Bapak Sidarto Danusubroto, Bapak Abdul Malik Fadjar, Bapak M. Yusuf Kartanegara, dan Bapak Subagyo Hadisiswoyo, bertukar cendera mata usai melaksanakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak I Gede Ngurah Swajaya, di KBRI Singapura, pada tanggal 15 Mei 2019.

Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, menerima audiensi dari perwakilan manajemen PT. Trimitra Hasanah Prima, di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2019. Pada acara tersebut, Ibu Sri Adiningsih menerima penjelasan mengenai "Buku Digital Interaktif" yang dibuat PT. Trimitra Hasanah Prima.



Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, memimpin pertemuan terbatas tentang "Membangun Pemerintahan yang Efektif dalam Menghadapi Tantangan dan Persaingan Antarbangsa", di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2019. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Wantimpres, Ibu Sri Adiningsih.



Bapak IGK Manila, Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Jan Darmadi, memberikan cendera mata kepada perwakilan manajemen PT Moringa Organik Indonesia (MOI) usai melaksanakan perjalanan dinas guna meninjau usaha pertanian dan pengolahan kelor yang dilakukan oleh PT MOI, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 Juni 2019.

▶ Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, memimpin pertemuan terbatas tentang "Menumbuhkembangkan Jiwa Entrepreneurship di Sekolah/Madrasah", di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada tanggal 18 Juni 2019.



▼ Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, didampingi oleh Bapak Mashudi Darto, Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak M. Yusuf Kartanegara, disambut Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Drs. Anang Revandoko, dalam kunjungan kerja ke Kantor Polda Kalimantan Tengah, pada tanggal 19 Juni 2019.



▲ Bapak Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, berfoto bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Bapak I Gusti Wesaka Puja, dan para pembicara lain pada acara "The 6th Interfaith Dialogue - Promoting 'Costly' Tolerance: Challenges for States and Religious Communities", di Sekolah Indonesia di Den Haag, Belanda, pada tanggal 20 Juni 2019.

▼ Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, disambut oleh para peserta didik SMK PUI Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 27 Juni 2019. Kegiatan tersebut merupakan salah satu acara dalam rangkaian kunjungan kerja beliau ke Kabupaten Majalengka.



▲ Bapak Subagyo Hadisiswoyo, Anggota Wantimpres, memberikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan Tim Kajian "Optimalisasi Pemulihan Keamanan Papua", di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada tanggal 2 Juli 2019.

▶ Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, disambut dengan tarian Tanggai saat tiba di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 Juli 2019. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka menghimpun informasi tentang pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan khususnya peningkatan kesadaran bela negara di era digital.



▲ Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema "Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan" yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Forum Gelora Kebangsaan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2019.

◀ Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, beserta Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, berfoto bersama para narasumber dan peserta pertemuan yang membahas topik "Permasalahan Penjualan Ayam Broiler", di Kantor Wantimpres, pada tanggal 4 Juli 2019.

Bapak Agum Gumelar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES), saat memimpin acara Pertemuan Terbatas dengan tema "Dampak Amendemen Empat Kali UUD RI 1945 terhadap Sistem Ketatanegaraan RI dan Upaya Penyelarasan Kembali kepada Nilai Dasar Pancasila" pada tanggal 31 Juli 2019, di Ruang Rapat Besar, Kantor WANTIMPRES.



Bapak. A. Malik Fadjar Foto Bersama setelah menggelar Pertemuan Terbatas dengan tema "Penataan Kelembagaan Pasca Pemilihan Presiden", pada tanggal 9 Juli 2019, di Ruang Rapat Besar, Kantor Dewan Pertimbangan Presiden



Ibu Sri Adiningsih berfoto bersama Kepala Sekolah dan siswa siswi SMK Negeri 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah saat melakukan kunjungan kerja bersama tim kajian "Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Indonesia di Era Digital" pada tanggal 23 Juli 2019

Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menjadi pembicara dalam Sarasehan Strategi RPJMN 2020-2024 berdasarkan Pancasila dengan tema "Prediksi Politik dan Keamanan Indonesia 2019-2024 dan Potensi Dampaknya pada Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan atas kerja sama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Lemhannas (31/7).

# WARTA Edisi 2 2019

